



Implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
<p>Warda Akhadatuz Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Wardaakhadatuszuhro@gmail.com 085815730564</p> <p>Isma Nurcahyaningtyas Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ismanurcahyaningtyas03@gmail.com 085609554558</p> <p>Isal Abellita Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur isalabellita@gmail.com 08563604890</p> <p>Erlang Viradiansyah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur erlangviran@gmail.com 08986385857</p> <p>Oktarizka Reviandani Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id 0822-3466-4047</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Akhadatuz, W., Nurcahyaningtyas, I., Abellita, I., Viradiansyah, E., & Reviandan, O., (2025). Implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5, (1), 53-58.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, mekanisme administrasi, dan langkah-langkah agar tujuan kebijakan publik dapat tercapai secara efektif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan program Kampung Binaan Kue oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan analisa dari hasil temuan data di lapangan terkait Implementasi Program Kampung Binaan Kota Surabaya (studi kasus kampung binaan kue kali rungkut) yang di lihat dari teori Implementasi Program menurut George C. Edward III. Dari keempat faktor tersebut dapat di simpulkan bahwa Implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya dapat dikatakan berhasil dan telah terlaksana dengan baik. Meskipun masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan program seperti adanya missskomunikasi dan kurangnya informasi yang jelas tentang kegiatan yang tidak tersampaikan dengan baik kepada semua pelaku UMKM, tetapi hambatan tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pihak terkait.

Kata Kunci: Implementasi, Kampung Binaan Kue, Program, UMKM.

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the program, the obstacles faced, the administrative mechanisms, and the steps so that the objectives of public policy can be achieved effectively. This research method uses a qualitative implementation approach to analyze the implementation of the Kue Fostered Village program by the Surabaya City Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Trade Service. The results of the study show an analysis of the findings of data in the field related to the Implementation of the Surabaya City Fostered Village Program (case study of the Kali Rungkut Kue fostered village) which is seen from the Program Implementation theory according to George C. Edward III. From these four factors, it can be concluded that the Implementation of the Surabaya City Kue Fostered Village Program can be said to be successful and has been implemented well. Although there are still several obstacles that affect the program implementation process such as miscommunication and lack of clear information about activities that are not conveyed properly to all MSME actors, these obstacles are a challenge that must be faced by the relevant parties.

Kata kunci: Implementation, Cake Fostered Village, Program, UMKM.

A. Pendahuluan

UMKM menjadi motor penggerak vital dalam perekonomian Indonesia, terutama sejak era krisis ekonomi 1997-1998. Pembentukan Dinas Koperasi dan UKM yang didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2008 menjadi landasan hukum dengan prinsip berwawasan lingkungan dalam pemberdayaan UMKM. UMKM terbukti mampu bertahan dengan keterbatasan dan kemampuannya di saat situasi krisis, serta berperan besar dalam memperluas kesempatan kerja dan menghasilkan tenaga kerja yang kreatif dan inovatif (Amalina, 2024). Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi terbesar, menghadapi tantangan serius terkait kurangnya lapangan pekerjaan. Namun, berdasarkan data BAPPEDA JAWA TIMUR, terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan dari 10,35% (Maret 2023) menjadi 9,79% (Maret 2024), dengan pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 206 ribu orang. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai strategi, termasuk program pemberdayaan Jatim Puspa yang berfokus pada peningkatan pendapatan wirausaha kecil dan UMKM.



Gambar Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Tahun 2023

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2023*

Dalam perkembangannya, UMKM menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik internal maupun eksternal. Menurut Maulida & Yunani (2017) tantangan tersebut meliputi masalah modal, teknik produksi, pangsa pasar, manajemen, teknologi, lemahnya pengambilan keputusan, pengawasan keuangan, rendahnya daya saing, persoalan perizinan, bahan baku, lokasi pemasaran, sulitnya memperoleh kredit bank, iklim usaha yang kurang kondusif, kepedulian masyarakat, dan kurangnya pembinaan. Kota Surabaya, melalui Perda No. 1 tahun 2021, mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk pemberian fasilitas promosi, sertifikasi produk halal, standarisasi SNI, dan kebijakan suku bunga ringan untuk permodalan usaha rakyat (Rohmanuddin et al., 2023). Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Program kampung binaan yang diinisiasi oleh Dinas Perdagangan Surabaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan UMKM. Program ini

diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam menghimpun dan membina UMKM sejenis untuk berkembang bersama, meskipun masih menghadapi kendala dalam aspek promosi dan pemasaran produk.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan program Kampung Binaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, mekanisme administrasi, dan langkah-langkah agar tujuan kebijakan publik dapat tercapai secara efektif. Fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (Agustino, 2006) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi mencakup transmisi informasi, kejelasan tujuan, dan konsistensi kebijakan agar dapat dipahami dan diterapkan oleh pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak terkait. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi dan kewenangan yang mendukung implementasi kebijakan. Disposisi menyoroti sikap, kejujuran, dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas sesuai tujuan yang ditetapkan. Struktur birokrasi menekankan pentingnya efisiensi melalui pembagian kewenangan, SOP yang mendukung, serta koordinasi antarunit organisasi. Dengan mengacu pada teori ini, penelitian berupaya menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam implementasi program Kampung Binaan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada sub bab ini peneliti akan menguraikan analisa dari hasil temuan data di lapangan terkait Implementasi Program Kampung Binaan Kota Surabaya (studi kasus kampung binaan kue kali rungkut). Peneliti ingin menjabarkan dengan rinci terkait implementasi program tersebut berdasarkan teori Edward III. Menurut George Charles Edwards III sebagaimana dikutip oleh (Anggara, 2014), ia mengungkapkan empat faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut diantaranya, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Berikut uraian pembahasan penelitian berupa analisa data dengan menggunakan landasan teori dengan fokus dan sasaran kajian sebagai berikut :

1. Komunikasi

komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan guna memenuhi tujuan. pada variabel ini, komunikasi yang dilakukan yakni secara media digital dan secara offline (Hasan et al., 2023). komunikasi adalah elemen penting dalam implementasi program Kampung Binaan Kue di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Ketua Paguyuban UMKM menjelaskan bahwa grup WhatsApp menjadi saluran utama untuk menyebarkan informasi umum, seperti jadwal penyuluhan dan pelatihan, kepada pelaku UMKM. Informasi yang sifatnya lebih khusus atau pribadi disampaikan secara langsung oleh pendamping, Mas Rizky, melalui pesan pribadi di WhatsApp Penyuluhan langsung dari Dinas Koperasi dan Disperindag pada awal program membantu pelaku UMKM memahami berbagai regulasi dan standar seperti PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Namun, kegiatan ini semakin jarang dilakukan, sehingga sebagian pelaku UMKM merasa kurang terlibat. Beberapa pelaku UMKM juga menyatakan adanya ketimpangan dalam pemerataan informasi, di mana hanya sebagian kecil kelompok yang mendapat perhatian utama.

Berdasarkan penjelasan data diatas maka, komunikasi antara ketua paguyuban kampung binaan kue di kali rungkut telah berjalan. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun komunikasi digital cukup efektif untuk menjangkau sebagian besar pelaku UMKM, pendekatan ini belum dapat memastikan pemerataan informasi. Tantangan lain adalah miskomunikasi yang kerap terjadi, terutama ketika informasi tidak disampaikan dengan jelas atau tidak diterima oleh semua pelaku. Solusi yang dapat diusulkan meliputi peningkatan frekuensi komunikasi langsung melalui forum diskusi atau musyawarah yang melibatkan seluruh pelaku UMKM. Forum ini tidak hanya menjadi wadah untuk menyampaikan informasi tetapi juga sebagai ruang untuk mendengarkan masukan dari pelaku UMKM, sehingga partisipasi menjadi lebih inklusif dan efektif.

2. Sumber Daya

Pada variabel sumber daya, Ketua paguyuban Kampung Binaan Kue Kali Rungkut, menyatakan menggambarkan perjalanan Kampung Kue dari inisiatif warga menjadi program yang didukung oleh pemerintah. Pada awalnya, program ini dimulai secara mandiri pada tahun 2005 tanpa dukungan dari pihak manapun. Dukungan pemerintah baru mulai terlihat pada tahun 2012 ketika Dinas Koperasi mengunjungi Kampung Kue dan membantu melegalkan koperasi melalui pembuatan akta notaris. Saat ini, pemerintah menyediakan berbagai bentuk dukungan, seperti pendampingan teknis, legalitas usaha, pelatihan, serta platform pemasaran melalui event. Sistem komunikasi pun telah dimodernisasi dengan pembentukan grup WhatsApp untuk menyebarkan informasi baik yang bersifat umum maupun khusus. Namun, wawancara dengan Ibu Mega, perwakilan Dinas Koperasi, mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah pendamping menjadi tantangan besar, terutama karena jumlah pelaku UMKM yang harus dilayani sangat banyak. Selain itu, beberapa pelaku UMKM merasa informasi tidak selalu disebarkan secara merata. Contohnya, kegiatan pemasaran di Taman Bungkul sering tidak diinformasikan kepada semua pelaku UMKM.



Gambar Wawancara dengan Ketua Paguyuban Kampung Kue Binaan Kali Rungkut
Sumber : Dokumen pribadi, 2024

Berdasarkan data tersebut, Variabel sumber daya menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berkomitmen menyediakan berbagai bentuk dukungan, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem distribusi informasi dan merancang pendekatan yang lebih inklusif. Pembuatan database UMKM yang lebih komprehensif dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam akses informasi. Selain itu, pelatihan tambahan untuk pendamping dan perencanaan kegiatan yang lebih terstruktur dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ini.

3. Disposisi

Variabel ketiga yakni disposisi, Adanya Disposisi pada implementasi program Kampung binaan kue di kali rungkut ini dibuktikan dengan, antusiasme masyarakat Kampung Binaan terhadap program sangat tinggi, terutama di kalangan mereka yang sudah memiliki keterampilan dasar dalam membuat kue (ibu nurul, Ketua Paguyuban Kampung Binaan Kue Kali Rungkut). Pelaku UMKM yang mengikuti program dengan serius melaporkan adanya peningkatan dalam keterampilan, kualitas produk, dan penjualan mereka. Namun, ada keluhan terkait kurangnya pemerataan dalam partisipasi kegiatan. Beberapa pelaku UMKM merasa bahwa hanya individu tertentu yang sering diundang atau dilibatkan, sehingga kesempatan tidak merata. Pemerintah, melalui Dinas Koperasi, telah menunjukkan sikap positif dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan aktif untuk pelaku UMKM. Program seperti PIRT dianggap sangat membantu, tetapi pelaku UMKM menyarankan agar ada lebih banyak kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan mereka, misalnya melalui forum diskusi yang melibatkan seluruh pelaku UMKM.



Gambar wawancara dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan
Sumber : Dokumen Pribadi,2024

Berdasarkan data yang diatas, menunjukkan adanya disposisi yang positif bahwa dari pelaku UMKM, seperti antusiasme dan komitmen, serta dukungan pemerintah yang konsisten, menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program. Namun, untuk mencapai keberlanjutan program, diperlukan peningkatan pada berbagai aspek, termasuk pendampingan yang lebih intensif, koordinasi yang lebih baik antar pihak, dan sistem komunikasi yang lebih inklusif. Dengan penguatan identitas Kampung Kue sebagai ikon UMKM di Surabaya dan perluasan akses pasar, program ini memiliki potensi besar untuk menjadi model pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

4. Struktur Birokrasi

Program Kampung Binaan Kue di Surabaya memiliki struktur birokrasi yang melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM, pendamping kecamatan, dan ketua paguyuban. Informasi disampaikan secara terstruktur melalui grup WhatsApp, memungkinkan koordinasi yang cepat dan efisien. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan, seperti sertifikasi PIRT, pengemasan, dan manajemen usaha, serta memberikan akses ke pameran nasional, seperti Bitusi di Pontianak. Dukungan pemasaran juga diberikan melalui platform digital e-peken. Namun, terdapat tantangan dalam distribusi informasi yang belum merata dan ketiadaan bantuan material seperti dana atau alat produksi, yang menyulitkan pelaku UMKM dengan keterbatasan modal. Ketimpangan akses terhadap manfaat program juga menjadi kendala, di mana pelaku UMKM yang kurang terjangkau pendamping cenderung tertinggal. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan mekanisme distribusi informasi yang lebih adil, pemberian bantuan material, serta evaluasi rutin untuk memastikan seluruh pelaku UMKM mendapat manfaat secara merata. Dengan langkah tersebut, program ini berpotensi menjadi model pemberdayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa Implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari teori Implementasi Program menurut George C. Edward III berdasarkan 4 faktor keberhasilan implementasi, yaitu sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya belum berjalan dengan efektif karena masih terdapat missskomunikasi antara pemerintah dan pelaku UMKM, yang mengakibatkan kurangnya informasi yang jelas dan ketidaksiapan sebagian pelaku untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam strategi komunikasi.

2) Sumberdaya

Sumberdaya dalam implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya sudah dikatakan efektif karena penyediaan sumber daya oleh pemerintah sudah efektif, dengan dukungan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi yang membantu integrasi pendampingan di setiap kecamatan. Koordinasi antara pemerintah dan pelaku UMKM juga cukup baik, meskipun masih bisa ditingkatkan.

3) Disposisi

Disposisi dalam implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya sudah dikatakan efektif karena dalam proses pelaksanaan program telah adanya dukungan yang aktif terhadap kebutuhan para UMKM terlihat dari hasil pelatihan dan pendampingan yang diberikan dari pihak pemerintah. Pelaku UMKM menunjukkan antusiasme dan inisiatif yang tinggi, yang berkontribusi pada keberhasilan pengembangan usaha mereka.

4) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik karena struktur organisasi pelaksanaan program sudah jelas dan terstruktur, dengan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan berperan sebagai fasilitator yang membantu meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang terstruktur.

Jadi pernyataan di atas dapat disimpulkan Implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya telah terlaksana dengan baik. Meskipun masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan program seperti adanya missskomunikasi dan kurangnya informasi yang jelas tentang kegiatan yang tidak tersampaikan dengan baik kepada semua

pelaku UMKM, tetapi hambatan tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pihak terkait.

E. Referensi

- Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. In *CV. Alfabeta*.
- Amalina, A. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Perekonomian Nasional. *Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 13(2), 338–348.
- Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Hasan, K., Utami, A., Eni, S., Izzah, N., & Cahya Ramadhan, S. (2023). Komunikasi Di Era Digital: Analisis Media Konvensional Vs New Media Pada Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh Angkatan 2021. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 2(1), 56–63. <https://doi.org/10.47431/jkp.v2i1.302>
- Maulida, S., & Yunani, A. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–196. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/155/864>
- Rohmanuddin, T. N., Sulistijono, S., Susanti, D., Abdul, F., Nurdiansyah, H., & Ramadhani, M. (2023). Upaya Sertifikasi Halal Produk Minuman pada UMKM untuk Mempermudah Kewirausahaan Mandiri. *Sewagati*, 7(4), 507–514. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.531>